



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PERAHU DAN MESIN KETINTING 10 PK MERK YAMAHA M.Z 300 DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang sarana dan prasarana transportasi masyarakat di Kabupaten Yahukimo khususnya moda transportasi sungai, dipandang perlu memberikan bantuan modal dan subsidi kepada masyarakat asli yahukimo pada beberapa distrik ;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan nama-nama Penerima Bantuan Perahu dan Mesin Ketinting di Kabupaten Yahukimo yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolalaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4855);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
13. DPA- SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Tahun 2016.

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Nomor 500/ 207/ DISHUB-Y HK/ 2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Permohonan pembuatan SK Bupati untuk penetapan nama- nama penerima bantuan perahu dan mesin ketinting 10 PK Merk Yamaha M.Z 300.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nama- Nama Penerima Bantuan Perahu dan Mesin Ketinting 10 PK Merk Yamaha M.Z 300 di Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A** : Penerima bantuan sebagaimana Diktum **KESATU** diatas adalah Putra Daerah asli Kabupaten Yahukimo;
- K E T I G A** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo melalui DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2016;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

**NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PERAHU DAN MESIN KETINGTING 10 PK MERK
YAMAHA M.Z 300 DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA PENERIMA	DISTRIK	JENIS BANTUAN
1	2	3	4
1	EFRAIM EMON	DISTRIK SUMO	PERAHU + MESIN KETINGTING
2	MARKUS OTIMUKA	DISTRIK DEKAI	PERAHU + MESIN KETINGTING
3	IBRANI OTIMUKA	DISTRIK DEKAI	PERAHU + MESIN KETINGTING
4	BENNY PAYAGE	DISTRIK SURU-SURU	PERAHU + MESIN KETINGTING
5	AMOS IRAH	DISTRIK OBIO	PERAHU + MESIN KETINGTING
6	HENGKY PAHABOL	DISTRIK DEKAI	PERAHU + MESIN KETINGTING
7	KAMPUNG PENEGIK	DISTRIK OBIO	PERAHU + MESIN KETINGTING
8	JHON W. DOYELA	DISTRIK KWELAMDUA	PERAHU + MESIN KETINGTING
9	MIKA HELUKA	DISTRIK OBIO	PERAHU + MESIN KETINGTING
10	NIKO KEYKERA	DISTRIK DEKAI	PERAHU + MESIN KETINGTING
11	KEPANI BUNE	DISTRIK DEKAI	PERAHU + MESIN KETINGTING
12	SOLEMA KEYKE	DISTRIK DEKAI	PERAHU + MESIN KETINGTING
13	YOZET HELUKA	DISTRIK OBIO	PERAHU + MESIN KETINGTING
14	BENI PAYAGE	DISTRIK SURU- SURU	PERAHU + MESIN KETINGTING
15	SAKEUS SENIK	DISTRIK OBIO	PERAHU + MESIN KETINGTING
16	MARTHEN SENIK	DISTRIK SURU- SURU	PERAHU + MESIN KETINGTING
17	AREN GIBAN	DISTRIK SURU- SURU	PERAHU + MESIN KETINGTING
18	SEPANYA PAYAGE	DISTRIK SURU- SURU	PERAHU + MESIN KETINGTING
19	YOSEP PAHABOL	DISTRIK DEKAI	PERAHU + MESIN KETINGTING
20	DANI SIEP	DISTRIK DEKAI	PERAHU + MESIN KETINGTING

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 132 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PERAHU DAN MESIN
KETINTING 10 PK MERK YAMAHA M.Z 300 DI KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2016**

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang sarana dan prasarana transportasi masyarakat di Kabupaten Yahukimo khususnya moda transportasi sungai, dipandang perlu memberikan bantuan berupa perahu dan mesin ketinting kepada masyarakat asli yahukimo pada beberapa distrik yang dapat ditempuh melalui jalur sungai;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan nama-nama Penerima Bantuan Perahu dan Mesin Ketinting di Kabupaten Yahukimo yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolalaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4855);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
16. DPA- SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Tahun 2016.

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Nomor 500/ 207/ DISHUB-Y HK/ 2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Permohonan pembuatan SK Bupati untuk penetapan nama- nama penerima bantuan perahu dan mesin ketinting 10 PK Merk Yamaha M.Z 300.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama- Nama Penerima Bantuan Perahu dan Mesin Ketinting 10 PK Merk Yamaha M.Z 300 di Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana Diktum KESATU diatas adalah Putra Daerah asli Kabupaten Yahukimo;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo melalui DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2016;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 05 Desember 2016

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19701221 200312 1 006

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 132 Tahun 2016
Tanggal : 05 Desember 2016

**NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN PERAHU DAN MESIN KETINGTING 10 PK MERK
YAMAHA M.Z 300 DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2016**

NO 1	NAMA PENERIMA 2	DISTRIK 3	JENIS BANTUAN 4
1	EFRAIM EMON	DISTRIK SUMO	PERAHU + MESIN KETINGTING
2	MARKUS OTIMUKA	DISTRIK DEKAI	PERAHU + MESIN KETINGTING
3	IBRANI OTIMUKA	DISTRIK DEKAI	PERAHU + MESIN KETINGTING
4	BENNY PAYAGE	DISTRIK SURU-SURU	PERAHU + MESIN KETINGTING
5	AMOS IRAH	DISTRIK OBIO	PERAHU + MESIN KETINGTING
6	HENGKY PAHABOL	DISTRIK DEKAI	PERAHU + MESIN KETINGTING
7	KAMPUNG PENEGIK	DISTRIK OBIO	PERAHU + MESIN KETINGTING
8	JHON W. DOYELA	DISTRIK KWELAMDUA	PERAHU + MESIN KETINGTING
9	MIKA HELUKA	DISTRIK OBIO	PERAHU + MESIN KETINGTING
10	NIKO KEYKERA	DISTRIK DEKAI	PERAHU + MESIN KETINGTING
11	KEPANI BUNE	DISTRIK DEKAI	PERAHU + MESIN KETINGTING
12	SOLEMA KEYKE	DISTRIK DEKAI	PERAHU + MESIN KETINGTING
13	YOZET HELUKA	DISTRIK OBIO	PERAHU + MESIN KETINGTING
14	BENI PAYAGE	DISTRIK SURU- SURU	PERAHU + MESIN KETINGTING
15	SAKEUS SENIK	DISTRIK OBIO	PERAHU + MESIN KETINGTING
16	MARTHEN SENIK	DISTRIK SURU- SURU	PERAHU + MESIN KETINGTING
17	AREN GIBAN	DISTRIK SURU- SURU	PERAHU + MESIN KETINGTING
18	SEPANYA PAYAGE	DISTRIK SURU- SURU	PERAHU + MESIN KETINGTING
19	YOSEP PAHABOL	DISTRIK DEKAI	PERAHU + MESIN KETINGTING
20	DANI SIEP	DISTRIK DEKAI	PERAHU + MESIN KETINGTING

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19701221 200312 1 006

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

